



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 29 Februari 2024

Halaman: 5

Birokrasi Lincih Kunci Pelayanan Cepat Kepada Masyarakat

YOGYA, TRIBUN - Birokrasi lincih menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga keinginan masyarakat bisa terpenuhi secepatnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, mengatakan, birokrasi lincih adalah birokrasi yang cepat dan mudah. Namun tidak jarang ada gap antara keinginan masyarakat dengan proses birokrasi itu sendiri. Sehingga pengelolaan SDM menjadi penting.

"Dulu mungkin birokrasi berbelit-belit ya, panjang. Sekarang sudah ada yang dipangkas. Meletakkan orang di tempat yang tepat itu menjadi penting, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat karena memang sudah ahli di pekerjaannya. Dulu mungkin karena kedekatan, padahal bukan kapasitasnya. Ini tidak mempercepat tetapi menghambat," katanya da-

lam "Obrolan Tugu", kemarin.

Menurut Kuncoro, birokrasi di Kota Yogyakarta sudah bagus. Selain dari sisi SDM, perlu juga dukungan infrastruktur dan fasilitas. Dengan demikian, tidak hanya dari sisi pelayanan yang prima, tetapi ada fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung birokrasi lincih.

"Kami dorong untuk membuat pelatihan-pelatihan, terutama untuk *front office* yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kemudian fasilitas juga ditingkatkan. Peralatan apa yang menunjang kinerja. Selagi itu meningkatkan kinerja dan untuk masyarakat, dalam rapat komisi pasti akan dilolokan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, menjelaskan, DPRD Kota Yogyakarta selalu mengawasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, mu-



ISTIMEWA/DOK. TRIBUN JOGJA

DISKUSI - Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko (kedua dari kiri), Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro (kedua dari kanan), dan Kabag Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Ristyawati (kanan), berdialog dalam "Obrolan Tugu", Rabu (28/2).

lai dari awal perencanaan-hingga evaluasi. Bahkan, pihaknya rutin melakukan evaluasi per tiga bulan.

"Sehingga capaian itu tidak ujung-ujug selesai. Tetapi bagaimana tahapan itu lambat laun tercapai. Ini dibutuhkan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Harus ada *road map* yang jelas, sehingga masing-masing bekerja sesuai dengan fungsinya," jelasnya.

la mengakui masih ada keluhan yang masuk dari masyarakat, terkait dengan bantuan sosial baik itu kesejahteraan, sekolah, kesehatan, perizinan, dan lainnya. Dari sisi pelayanan, Pemkot Yogyakarta telah memiliki standar operasional prosedur (SOP). Menurut dia, SOP yang sudah ada tidak bisa dikesampingkan.

Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Ristyawati, mengungkapkan reformasi birokrasi telah digabungkan sejak 2010 lalu, ada 8 area perubahan mulai dari SDM yang kompeten, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan lainnya.

Sejak tahun 2023 lalu, reformasi birokrasi dibagi menjadi dua bagian yaitu reformasi general dan reformasi tematik. Reformasi general berkaitan dengan hulu, meliputi kepegawaian, pengelolaan arsip, pengelolaan keuangan, pelayanan publik dan lainnya.

"Artinya meskipun birokrasi diperbaiki harus ada efeknya. Misalnya apakah kemiskinan turun, stunting turun atau enggak, inflasi turun atau tidak, pemanfaatan produk dalam negerinya naik atau enggak. Sehingga indikatornya jauh lebih banyak," ungkapnya.

Kota Yogyakarta sendiri mendapat nilai 89,25 dalam reformasi birokrasi atau predikat A. Prestasi tersebut diraih karena implementasi reformasi birokrasi tematik di semua sektor bagus. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan evaluasi, termasuk survei kepuasan masyarakatnya.

"Digitalisasi terus digenjut, karena tidak bisa dipungkiri digitalisasi kan memang mempercepat layanan. Digitalisasi jalan terus, tetapi bukan berarti semua digital. Kami tetap membuka loket pelayanan, kan yang tidak memiliki handphone juga perlu dilayani," imbuhnya. (**maaword**)

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005